

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Gambaran Umum Organisasi

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar yang harus dilaksanakan setiap pemerintah daerah. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang sosial yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dengan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas dan;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Adapun Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber daya manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut:

Table 1.1
Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		L	P	
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SLTA	5	2	7
4	D1-D3	-	1	1
5	S1	8	4	12
6	S2	7	4	11
JUMLAH		20	11	31

Tabel 1.2
Data pegawai berdasarkan pangkat dan golongan

	Golongan													
	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
Jumlah Personil	-	-	-	-	-	-	2	6		2	3	8	8	1

Table 1.3
Data pegawai berdasarkan jenis jabatan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	21
2	Pelaksana	10
Jumlah		31

Sedangkan untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Table 1.4
Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
	SOSIAL					
1	Electric generating set lainnya	Buah	4	-	4	
2	Pompa lainnya	Buah	1	-	1	
3	Station wagon		3	-	3	
4	Mini bus (penumpang 14 orang kebawah)	buah	3	-	3	
5	Sepeda motor	buah	40	-	40	
6	Gergaji chain saw	Buah	1	-	1	
7	Mesin ketk manual portable (11-13 inci)	Buah	1	1	2	
8	Mesin ketik manual langewagon (18-27 inci)	buah	1	-	1	
9	Lemari besi/metal	Buah	5	3	8	
10	Lemari kayu	Buah	16	-	16	
11	Rak besi	buah	2	-	2	
12	Filing cabinet besi	Buah	12	4	16	
13	Brangkas	Buah	1	1	1	
14	Lemari kaca	Buah	16	-	16	
15	White board	Buah	3	-	3	
16	LCD Projector/infocus	Buah	7	-	7	
17	Layar LCD	Buah	2	-	2	
18	Alat kantor lainnya	Buah	1	-	1	korden
19	Alat kantor lainnya	Buah	2	-	2	Gedung aula
20	Kursi besi/metal	Buah	-	10	10	
21	Kursi kayu	Buah	-	3	3	
22	Meja rapat	Buah	15	-	15	
23	Meja telephone	Buah	4	-	4	
24	Meja resepsionist	Buah	2	-	2	
25	Meja tambahan	Buah	1	-	1	
26	Meja ½ biro	Buah	25	-	25	
27	Kasur/spring bed	Buah	10	-	10	
28	Meja makan besi	Buah	2	-	2	
29	Kursi fiber glas/plastic	Buah	49	-	49	
30	Kursi rapat	Buah	171	-	171	

No	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
31	Kursi tamu	Buah	4	-	4	
32	Kursi putar	Buah	4	3	7	
33	Bangku tunggu	Buah	4	-	4	
34	Kursi lipat	Buah	-	1	1	
35	Meja computer	Buah	4	-	4	
36	Sofa	Buah	7	-	7	
37	Meubeleur lainnya	Buah	-	7	7	
38	Mesin pemotong rumput	Buah	1	-	1	
39	Mesin cuci	Buah	1	-	1	
40	Lemari es	Buah	2	1	3	
41	AC Window	Buah	20	-	20	
42	AC Split	Buah	2	-	2	
43	Kipas angin	Buah	27	-	27	
44	Kompor gas	Buah	3	1	4	
45	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1	-	1	
46	Kitchen Set	Buah	1	-	1	
47	Tabung gas	Buah	5	-	5	
48	TV	Buah	6	1	7	
49	Sound system	Buah	4	-	4	
50	Megaphone	Buah	1	-	1	
51	Microphone	Buah	3	-	3	
52	Microphone floor stand	Buah	3	-	3	
53	Unit power supply	Buah	1	-	1	
54	Mesin jahit	Buah	2	-	2	
55	Lambing garuda pancasila	Buah	1	-	1	
56	Gambar presiden/wakil presiden	Buah	1	-	1	
57	Dispenser	Buah	5	-	5	
58	Mimbar/podium	Buah	1	-	1	
59	Gordyin/kray	Buah	1	-	1	
60	Lampu	Buah	3	-	3	
61	Alat rumah tangga lainnya	Buah	5	-	5	
62	Meja kerja pejabat eselon II	Buah	1	-	1	
63	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	4	-	4	
64	Meja kerja pejabat eselon IV	Buah	4	-	4	
65	Meja kerja pegawai	Buah	1	-	1	

No	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
	non structural					
66	Kursi kerja pejabat eselon II	Buah	1	-	1	
67	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	4	-	4	
68	Kursi kerja pejabat eselon IV	Buah	19	-	19	
69	Kursi kerja pegawai non structural	Buah	10	10	20	
70	Kursi tamu di depan ajudan	Buah	-	18	18	
71	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	Buah	-	3	3	
72	Camera electronic	Buah	4	-	4	
73	Alat pemanas prosesing (water heater)	Buah	2	-	2	
74	Layar film /projector	Buah	1	-	1	
75	Telephon (PABX)	Buah	2	-	2	
76	Pesawat telephone	Buah	1	-	1	
77	Handy talky (HT)	Buah	53	-	53	
78	Facsimile	Buah	1	-	1	
79	Alat komunikasi radio uhf lainnya	Buah	1	-	1	
80	Peralatan antenna shf/parabola	Buah	4	-	4	
81	Stetoscope (alat kedokteran umum)	Buah	1	-	1	
82	Tensimeter	Buah	2	-	2	
83	Timbangan badan (alat kedokteran umum)	Buah	1	-	1	
84	Alat kedokteran umum lainnya	Buah	2	-	2	
85	Alat dengrening jeruk nipis 100 kg	Buah	3	-	3	
86	Infrared thermometer	Buah	2	-	2	
87	PC Unit	Buah	8	1	9	
88	Laptop	Buah	44	-	44	
89	Note book	Buah	21	1	22	
90	Tablet pc	Buah	2	-	2	
91	Printer (peralatan personal computer)	Buah	61	4	65	
92	External	Buah	3	-	3	
93	Peralatan personal computer lainnya	Buah	26	1	27	

No	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
94	Router	Buah	1	-	1	
95	Peralatan jaringan lainnya	Buah	1	-	1	
96	Tenda	Buah	2	-	2	
97	Bangunan gedung kantor permanen	Unit	1	-	1	
98	Bangunan rumah sakit jiwa	Unit	1	-	1	
99						
	KB					
100	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	1	-	1	
101	Filing Cabinet Besi	Buah	1	2	3	
102	A.C. Window	Buah	6	-	6	
103	Lemari Besi/Metal	Buah	-	1	1	
104	Rak Besi	Buah	-	1	1	
105	Rak Kayu	Buah	-	1	1	
106	Filing Cabinet Besi	Buah	1	-	1	
107	Kipas Angin	Buah	1	1	1	
108	Lemari Kaca	Buah	1	-	1	
109	Sound System	Buah	1	-	1	
110	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	2	-	2	
111	LCD Projector/Infocus	Buah	1	-	1	
112	Kursi Putar	Buah	3	-	3	
113	P.C Unit	Buah	1	1	2	
114	Note Book	Buah	10	-	10	
115	Unit Power Supply	Buah	1	-	1	
116	Camera Video	Buah	1	-	1	
117	Handy Cam	Buah	1	-	1	
118	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	9	-	9	
119	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Buah	1	-	1	
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	-	3	
121	Tenda	Buah	1	-	1	
122	Camera Electronic	Buah	1	-	1	
123	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1	-	1	
124	Filing Cabinet Besi	Buah	1	-	1	
125	Lemari Kaca	Buah	1	-	1	
126	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2	-	2	

No	Jenis Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
127	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	1	-	1	
128	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	-	1	1	
129	Lap Top	Buah	1	-	1	

Sumber: Dinas Sosial dan PPKB, 2021

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan oraganisasi perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta Tata kerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas membawahi:

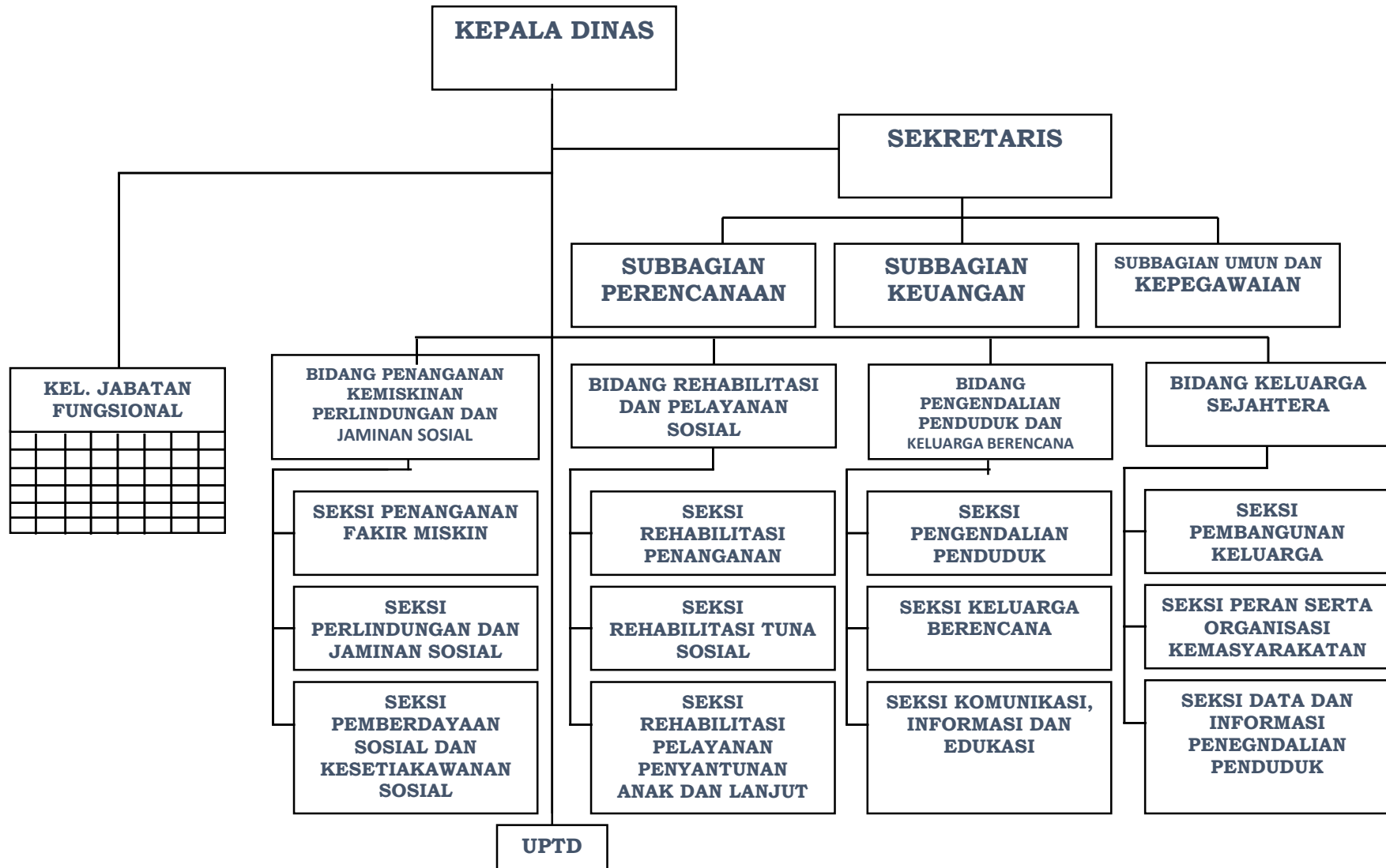
- Sub bagian umum dan kepegawaian
- Sub bagian keuangan
- Sub bagian Perencanaan

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

- c. Bidang penanganan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial
 - Seksi penanganan fakir miskin
 - Seksi perlindungan dan jaminan sosial
 - Seksi pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan
- d. Bidang Rehabilitasi dan pelayanan sosial
 - Seksi rehabilitasi penyandang disabilitas

- Seksi rehabilitasi tuna sosial
- Seksi rehabilitasi pelayanan, penyantunan anak dan lanjut usia
- e. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Seksi pengendalian penduduk
 - Seksi keluarga berencana
 - Seksi komunikasi, informasi, dan edukasi
- f. Bidang keluarga sejahtera
 - Seksi pembangunan keluarga
 - Seksi peran serta organisasi kemasyarakatan
 - Seksi data dan informasi pendalian penduduk

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



1.2 Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”* dengan melaksanakan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melalui misi yaitu Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat dan Meningkatkan perekonomian daerah guna memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Adapun dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pengendalian penduduk di kabupaten Kebumen, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan strategi:

1. Pendampingan dan perlindungan sosial;
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial;
3. Penguatan kapasitas dan motivasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS;

4. Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan;
5. Perlindungan dan jaminan sosial;
6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial;
7. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
8. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan pelayanan KB di kecamatan;
10. Cakupan pelayanan KB aktif;
11. Pemberdayaan kader kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL).

Sedangkan dalam pelaksanaan hal tersebut, kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di arahkan kepada:

1. Perlindungan sosial bagi lanjut usia dan anak terlantar di luar panti;
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat) terlantar di luar panti;
3. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pengemis dan gelandangan terlantar di luar panti;
4. Pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial;
5. Penguatan kapasitas PSKS guna mendukung penanganan PMKS serta meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan;
6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana alam dan bencana sosial, pengerahan anggota TAGANA di lokasi bencana serta penyiapan TAGANA yang tangguh;
7. Fasilitasi koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah;
8. Pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);

9. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan, dan profesional;
10. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Adapun kebijakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

- 1) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Peningkatan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

1.3 Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - a. Belum tersedianya data PPKS yang komprehensif dan valid;
 - b. Banyaknya PPKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi;
 - c. Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera;
 - d. Banyaknya Lanjut Usia terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani.
2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. Tidak bisa mengeluarkan kepesertaan DTKS bagi warga yang sudah mampu khususnya PNS/TNI/POLRI;

- b. Tidak ada perangkingan/ status kesejahteraan/ desil di dalam DTKS;
 - c. DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA;
 - d. Belum ada payung hukum terkait kriteria kemiskinan terupdate pengusulan DTKS;
 - e. Sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2021 permohonan DTKS dan BAST ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
- a. Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana.

Sementara permasalahan utama yang dihadapi Dinsos PPKB dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- 1. Jumlah tenaga petugas Keluarga Berencana (PKB) yang tidak ideal, 1 PKB mengampu lebih dari 4 desa;
- 2. Belum semua pasangan usia subur (PUS) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan misi organisasi, serta tujuan-tujuan pokok yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.

a. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025, Visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 adalah:

“Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Argobisnis”

Dan dari empat Visi yang akan dilaksanakan dalam RPJPD yang meliputi: (1) mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat, (2) membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, (3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, serta (4) memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi kesejahteraan rakyat; maka misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah

Misi kedua dan Misi keempat untuk menunjang visi Bupati Kebumen yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat”

Berdasarkan Visi Bupati Kebumen maka ditetapkan Misi Bupati Kebumen:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mendukung Misi

Dua

“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya”

Tiga

“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”

Untuk mendukung visi dan misi Bupati tersebut maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

b. Tujuan

Pembentukan visi dan misi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yakni

1. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan.

c. Sasaran

Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan pembangunan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan masyarakat;
2. Berkurangnya penduduk miskin.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja OPD sesuai Renstra 2016-2021
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD (***))	Target Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase (%) PMKS terlanjar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%		-	-	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD (***)	Target Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Meningkat dan menguatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS	30	-		10%	10%	20%	20%	20%	20%
3	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	70	90		60%	65%	70%	74%	80%	90%
4	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB	87	90		80%	82%	85%	87%	89%	89%
5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5%	1%		1,21%	1,24%	1,28%	1,32%	1,37%	1,37%
6	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	65%	77%		77,65%	78,00%	78,84%	79,45%	80,75%	80,75 %
7	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	5%	5%		12%	11,15%	8,35%	6,15%	5%	5%
8	Rasio Pembina KB (PPKBD) 1 petugas setiap desa / kelurahan	1 orang	1 orang		1 org / desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa	1 org/ desa
9	Rasio Petugas Lapangan KB (Penyuluh KB) satu penyuluh KB membina desa	2 desa	2 desa		6 desa	5 desa	4 desa	3 desa	2 desa	2 desa
10	Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30 %	30 %		0,50%	1,00%	1,10%	1,85%	2,00%	2,00%
11	Cakupan	80%	90%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD (***)	Target Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2020	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa									

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 berikut Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase (%) Capaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	92 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	16,20 %
3.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Cakupan peserta KB Aktif	85,50 %
		Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	32,27%

Sedang Program dan Anggaran yang di kelola Dinsos PPKB adalah sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Tahun 2021

No	Program	Anggaran		Bertambah / (berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.416.786.000	5.337.788.000	(78.998.000)
2.	Program Pemberdayaan Sosial	377.719.000	364.869.000	12.850.000
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10.000.000	10.000.000	(0,00)

No	Program	Anggaran		Bertambah / (berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4.	Program Rehabiltasi Sosial	1.820.592.000	1.659.599.000	(160.933.000)
5.	Program Perlindungan dan Jaminan	605.970.000	232.909.000	(373.061.000)
6.	Program Penanganan Bencana	1.053.479.000	1.275.540.000	222.061.000
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	475.618.000	470.618.000	(5.000.000)
8.	Program Pengendalian Penduduk	12.328.677.000	12.210.355.000	(118.342.000)
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	10.877.091.000	10.653.605.000	(223.486.000)
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.207.366.000	1.177.596.000	(29.770.000)
	TOTAL	22.088.841.000	21.561.658.000	(527.183.000)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Agar dapat dilakukan pengukuran kinerja maka dibutuhkan data kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang

dilaksanakan berupa indikator output maupun indikator outcome yang dapat direalisasikan dari masing masing program dan kegiatan. Data kinerja dapat berupa data kualitatif maupun data kuantitatif yang bersumber dari:

- Laporan Target, Realisasi Fisik dan Keuangan;
- Laporan Keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021;
- Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021;
- LKjIP Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021;
- Hasil wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Data terkumpul kemudian disusun dan diolah menjadi data kualitatif maupun kuantitatif dari indikator kinerja suatu sasaran strategis maupun indikator kinerja utama dari sasaran.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2020). Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (tahun 2021) dan DPA Perubahan tahun 2021. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dan DPA Perubahan 2021.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*out come*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) melalui media berupa formulir Pengukuran Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan 4 (empat) skala pengukuran dengan rumus dan kategori sebagai berikut: Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran, dimaksudkan maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

I. Capaian Kinerja tahun 2021

Sesuai dengan tupoksinya, Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program/kegiatannya adalah untuk mendukung sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat, dengan Indikator Sasaran Angka Kemiskinan.

Realisasi dan Capaian indikator kinerja angka kemiskinan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Angka kemiskinan tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD	% Capaian terhadap Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Angka Kemiskinan	16,82 %	15,45%	17,83 %	86,65%	15,45%	86,65%

Target dan Realisasi Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Tabel 3.3
Target Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran (IKU Daerah)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan	%	20,20	19,26	18,05	17,74	16,98	16,22	15,45

Table 3.4
Realisasi Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran (IKU Daerah)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kemiskinan	%	20,20	19,86	19,60	17,47	16,82	17,59	17,83

Grafik 3.1
Realisasi indikator kinerja utama (IKU) Daerah yang di dukung
Dinsos PPKB dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021



Untuk mendukung Indikator Angka Kemiskinan Dinsos PPKB mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yakni:

1. Cakupan Penanganan PMKS
2. Cakupan Peserta KB Aktif
3. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinsos PPKB
Tahun 2021

Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi tahun 2020	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian tahun 2021
Cakupan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	%	70,65	16,20	89,18	550,49
Cakupan Peserta KB aktif	%	71,41	85,50	69,12	80,84
Cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	53,03	32,27	45,25	140,22
Rata-rata persentase capaian kinerja 2021					257,18%

Berdasarkan Table 3.5 rata rata capaian kinerja tahun 2021 sebesar 257,18% atau dengan kategori sangat baik, dari ke tiga indikator kinerja, dua indikator capaiannya melampaui 100% dan satu indikator kinerja tidak tercapai. Untuk indikator kinerja Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari target 16,20% realisasi mencapai 89,18% sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 550,49%. Capaian yang cukup tinggi ini disebabkan adanya berbagai Program Bansos yang bersumber dari APBN, sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan capaian indikator kinerja Cakupan Peserta KB aktif dari target 85,50% hanya tercapai 69,12%, indikator kinerja ini tidak tercapai karena pemasangan target yang terlalu tinggi, sementara target Nasional hanya sebesar 65%. Sehingga capaian kinerja sebesar 80,84% secara nasional sudah sangat baik karena sudah melampaui target Nasional. Sementara itu capaian kinerja indikator Cakupan pembinaan keluarga sejahtera sebesar 140,22% capaian ini diperoleh dari realisasi kinerja sebesar 45,25% dari target sebesar 32,27%.

Untuk mencapai sasaran kinerja Cakupan penanganan PMKS Dinsos PPKB melaksanakan berbagai program/kegiatan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Kabupaten. Program yang bersumber dari APBD meliputi:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penangan Bencana;

Disamping dukungan beberapa program yang dibiayai APBD, capaian IKU Cakupan Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial ini juga didukung adanya program pemerintah pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Program Sembako Reguler, Program Sembako PPKM (perluasan), Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat terdampak Covid, bantuan kepada anak terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, pemberian alat bantu kepada disabilitas, KIS PBI APBN dan Program Jaring Pengaman Sosial dari pemerintah provinsi.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Cakupan Peserta KB Aktif, dilaksanakan berbagai program yakni:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Keluarga Berencana.

Sedangkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Pembinaan Keluarga sejahtera dilaksanakan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2021 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 21.561.658.000,- terealisasi sebesar Rp 19.563.311.308,- atau sebesar 90,73%, sehingga terdapat efisiensi sebesar *Rp1.998.346.692,-*

Program pendukung sasaran strategis antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
- 4) Program Rehabilitasi Sosial;
- 5) Program Perlindungan Sosial;
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 7) Program Penanganan Bencana;
- 8) Program Pengendalian Penduduk;
- 9) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- 10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a. Belum tersedianya data PMKS yang komprehensif dan valid
 - b. Banyaknya PMKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi
 - c. Penanganan PMKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera
 - d. Banyaknya lanjut usia terlantar sementara di kebunem belum ada lembaga yang secara khusus menangani
 - e. Minimnya sumber daya manusia (SDM)
2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. Tidak bisa mengeluarkan kepesertaan DTKS bagi warga yang sudah mampu khususnya PNS/TNI/POLRI
 - b. Tidak ada perangkat/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS
 - c. DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA. Contoh: tidak bisa melakukan intervensi disabilitas yang ada di DTKS.
 - d. Belum ada payung hukum terkait kriteria kemiskinan terupdate pengusulan DTKS
 - e. Sesuai Permensos Nomor 3 tahun 2021 permohonan DTKS dan BAST ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial
3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana

4. Hambatan yang ada di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum adanya fasilitas permodalan bagi kelompok UPPKS;
 - b. Drop Out dan *Unmeet need* peserta KB yang masih tinggi.

Upaya yang telah dilakukan

- a. Melakukan pendataan penyandang disabilitas pada tahun 2020
- b. Diajukan masuk DTKS jika memenuhi persyaratan
- c. Dicarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat. Contoh: BAZNAS
- d. Merujuk ke panti pemerintah terdekat
- e. Memaksimalkan SDM dan PSKS yang sudah ada dan menjalin networking
- f. Menidaklayakan KPM yang sudah mampu khususnya PNS/TNI/POLRI
- g. Melakukan verval lapangan terhadap DTKS untuk menentukan data penerima bansos
- h. Menggunakan DTKS periode Oktober 2020 dan kroscek ke lapangan
- i. Mengusulkan DTKS menggunakan 11 kriteria Fakir Miskin teregister sesuai Kepmensos 146/huk/2012
- j. Permohonan DTKS menggunakan tandatangan Bupati dan BAST menggunakan tandatangan Kepala Dinas Sosial.
- k. Penguatan kapasitas kelompok Rentan di 8 Kecamatan daerah zona merah(Karanganyar, Karanggayam, Puring, Padureso, Karangsambung, Sadang, Sempor, Kwarasan)
- l. Kegiatan tagana masuk sekolah (YMS) dari PAUD s/d SLTA kawasan pesisir
- m. Kegiatan Green Belt Mangrove seluas $\pm$ 104 ha dari DAS Ijo, Telomoyo, Lukulo sampai DAS Wawar.

- n. Pelatihan simulasi untuk pelaku wisata pantai 10 titik dari pantai Ayah sampai pantai Lembu Purwo kecamatan Mirit.
- o. Kegiatan Tagana masuk nelayan melalui DPC HNSI Kab. Kebumen untuk 4 TPI (TPI Pedalen, Logending, Karangduwur, dan TPI Pasir).
- p. Pembentukan 2 KWSB.
- q. Kesiapan logistik dan distribusi logistik ke penyintas.
- r. Penyiapan lumbung sosial di 4 kecamatan (Karanganyar, Gombong, Prembun dan Karangsambung) dan lumbung rumah.
- s. Bimtek Tagana meliputi pengenalan karaktersitik bencana, PPGD dan layanan dukungan psikososial.

Saran/Rekomendasi

- a. Harus tersedia data PMKS yang valid
- b. Diusulkan masuk dalam data DTKS
- c. Perlu adanya Dana Tak Terduga untuk penanganan yang bersifat Darurat
- d. Perlunya adanya lembaga yang menangani Lanjut Usia Terlantar
- e. Menambah SDM yang sesuai kebutuhan
- f. Menambah menu di aplikasi SIKS-NG untuk mengeluarkan warga yang sudah mampu khususnya PNS/TNI/POLRI.
- g. Perlu dilakukan pemeringkatan kesejahteraan oleh Pusdatin Kesos Kemensos RI.
- h. DTKS agar dilengkapi dengan keterangan sosial ekonomi seperti DTKS Oktober 2020.
- i. Segera mengeluarkan Kepmensos baru terkait 9 kriteria yang sudah disosialisasikan oleh Ibu Menteri Sosial RI.
- j. Permohonan dan BAST DTKS agar menggunakan tandatangan Kepala Dinas Sosial saja sesuai Permensos nomor 3 Tahun 2021.

- k. Meningkatkan edukasi tentang kebencanaan pada masyarakat melalui media masa dan elektronik.
- l. Bekerjasama dengan BPBD, PMI, MDMC dan SAR untuk menyebarluaskan informasi tentang kebencanaan.
- m. Membantu kelompok UPPKS dalam pemasaran produk;
- n. KB paska persalinan dan paska keguguran untuk bisa dimaksimalkan;
- o. Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipertajam melalui berbagai media baik elektronik maupun cetak, KIE perorangan dan kelompok serta media sosial lainnya.

Upaya untuk mencapai target akhir Renstra

- a. Pemutakhiran Data Kemiskinan;
- b. Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS terlantar;
- c. Pemutakhiran data keluarga Indonesia;
- d. Bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan pelayanan KB terutama KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- e. Memperkuat KIE.

1. Perbandingan capaian kinerja Cakupan Penanganan PMKS tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.6

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui cakupan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020

Indikator kinerja	Satuan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian kinerja
Cakupan penanganan penyandang	%	16,20	96,12	16,20	89,18	550,49

Indikator kinerja	Satuan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian kinerja
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)						

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya Keberdayaan Masyarakat melalui Cakupan Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2020 dibanding dengan tahun 2021 memperoleh capaian kinerja 550,49%. Pada tahun 2020 dengan target 16,20% terealisasi sebesar 96,12% dan pada tahun 2021 dengan target 16,20% terealisasi sebesar 89,18%.

Angka ini diperoleh dari jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 716.639 jiwa dibagi jumlah PMKS dalam DTKS sejumlah 803.592 jiwa. Kenaikan capaian kinerja yang cukup signifikan ini disebabkan adanya Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana yang pagu anggaranya cukup memadai. Program Penanganan Bencana meliputi pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi 605 orang korban bencana alam dan korban kebakaran, bantuan sandang untuk 37 orang korban bencana, bimbingan psikososial bagi 25 orang, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan bagi 250 orang, Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi 132 orang, bantuan keuangan untuk rehab rumah bagi 29 korban bencana alam dan korban kebakaran.

Kinerja Program Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi 90 orang lansia terlantar, 100 orang anak terlantar dan 50 orang disabilitas terlantar. Bantuan alat bantu kesehatan bagi 590 orang disabilitas terlantar, bantuan keuangan bagi 133 orang penyandang cacat berat, bantuan keuangan bagi 83 PMKS terlantar kehabisan bekal. Bantuan

permakanan dan sandang bagi 120 orang ODGJ di Rusi Dosaraso, bantuan permakanan bagi 45 ODGJ di 3 Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Bantuan permakanan bagi 80 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta layanan data dan aduan bagi 50 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Disamping Program yang dibiayai APBD juga ada program dari pemerintah pusat yang mendukung penanganan PMKS di Kab. Kebumen. Adapun program APBN meliputi Program Sembako Reguler bagi 118.513 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan bagi 60.563 KPM, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 42.262 KPM, Program Sembako PPKM (perluasan) 14.567 orang, KIS PBI APBN 473.237 KPM, Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Prov kepada 4.933 orang.

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Adapun rincian Jumlah PMKS di Kabupaten Kebumen yang mendapatkan pelayanan sosial dari Dinsos PPKB adalah sebagai berikut:

Table 3.7
Data Penanganan PMKS di Kabupaten Kebumen Tahun 2021

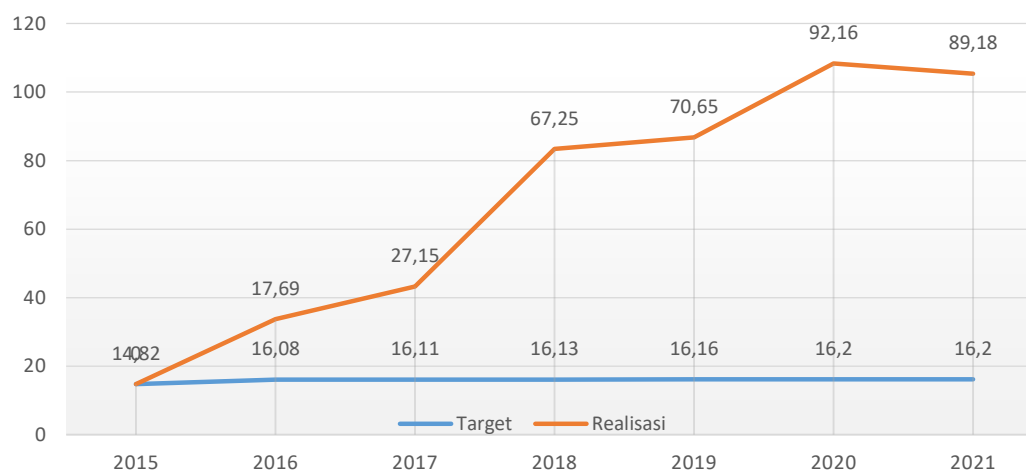
Jenis Bantuan	Jumlah	Satuan	Keterangan
- Bantuan keuangan	29	orang	Korban kebakaran 16 orang, korban bencana alam 13 orang (bantuan Keuangan)
- Penyediaan makanan	605	orang	Dapur umum, bantuan logistic korban bencana alam, bantuan logistic korban kebakaran
- Penyediaan Sandang	37	Orang	
- Pelayanan Dukungan Psikososial	25	Orang	
- Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	132	Orang	
- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	250	Orang	
- Pemberian permakanan untuk Rusi Dosaraso	120	Orang	
- Penyediaan alat bantu	590	Orang	
- Bantuan keuangan untuk penyandang disabilitas cacat berat	133	Orang	
- Pemberian bantuan keuangan untuk Orang dengan kehabisan bekal	83	Orang	
- Pemberian bantuan sosial permakanan untuk WRSE	80	Orang	
- Pemberian bantuan sosial permakanan untuk ODGJ	45	Orang	Yayasan Al Naas Badru Pengobatan Alternatif Desa Surotrunan Kec. Alian 15 orang, Yayasan Bahrul Ulum Mahfudiyah Panti Rehabilitasi Mental Desa Sawangan Kec. Alian 15 orang, dan Padepokan Mbah Marsio Pengobatan Alternatif DS Winong Kec. Mirit 15 orang
- Pemberian bantuan sosial permakanan untuk lansia terlantar	90	Orang	
- Pemberian bantuan sosial permakanan untuk anak terlantar	100	Orang	
- Pemberian bantuan sosial untuk disabilitas terlantar	50	Orang	
- Layanan Data dan Pengaduan	50	Orang	

Jenis Bantuan	Jumlah	Satuan	Keterangan
- Pemberian bantuan sosial alat bantu dari APBN	145	Orang	Tongkat 3 buah dari Banyumas, motor roda 3 dari banyumas 2buah, kursi roda 5 buah, dari Provinsi Kursi roda 2 buah, Alat Bantu Dengar dari Temanggung Kartini 1 buah, 132 buah dari kemensos LKS Gombang
- Program Sembako Reguler	118.513	Orang	Bulan Oktober
- Program Keluarga Harapan	60.563	KPM	
- Program Bantuan Sosial Tunai	42.262	Orang	
- Program Sembako PPKM (perluasan)	14.567	Orang	
- KIS PBI APBN	473.237	Orang	Non sembako non PKH
- Program Jaring Pengaman Sosial	4.933	Orang	Pencairan Tahap 2
Jumlah	716.638	jiwa	
DTKS	803.592	Jiwa	

Sumber: DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2021

Dari data diatas dapat diketahui jenis data DTKS (Rumah Tangga) mencapai 803.592 jiwa dan data PMKS Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mendapatkan bantuan sejumlah 716.638 jiwa. Kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen teralisasi 89,18%, sehingga capaian indikator kinerja Cakupan Penanganan PMKS sebesar 550,49. Hal ini disebabkan adanya program nasional Bantun Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, Program PKH dan program penanganan PMKS lain baik yang bersumber dana APBN, APBD Prov maupun APBD Kabupaten.

Grafik 3.2
Grafik Cakupan Penanganan PMKS



Dari grafik 3.9 Cakupan Penanganan PMKS dapat disimpulkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 89,18% dengan target 16,20% dibanding dengan tahun 2020 dengan realisasi sebesar 92,16% dengan target 16,20%.

1. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.8
Realisasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka mendukung indikator cakupan penanganan PMKS tahun 2021

Program /kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Rehabilitasi Sosial			
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	933.348.000	859.586.774	92,09%
Penyediaan Permakanan	259.622.000	214.594.254	82,65%
Penyediaan Alat Bantu	420.246.000	391.549.800	93,17%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	212.400.000	212.400.000	100%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	31.080.000	31.067.800	99,96%

Program /kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pemberian Layanan Kedaruratan	10.000.000	9.974.920	99,74%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	726.251.000	684.452.375	94,24%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.340.000	16.338.400	99,99%
Penyediaan Permakanan	460.303.000	425.149.800	92,36%
Penyediaan Sandang	78.315.000	77.059.950	98,39%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	171.293.000	165.904.225	88,85%
Program Penanganan Bencana			
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	1.167.161.000	993.856.549	85,15%
Penyediaan Makanan	445.311.000	299.343.900	67,22 %
Penyediaan Sandang	92.500.000	89.859.725	97,14 %
Penyediaan Tempat Pengungsi	412.196.000	403.313.300	97,84 %
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	170.054.000	159.852.364	94,00 %
Pelayanan dukungan psiko sosial	47.100.000	41.487.860	88,08%
TOTAL	2.826.760.000	2.537.895.698	89,78%

Berdasarkan table 3.10 cakupan penanganan PMKS di tahun 2021 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1.659.599.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.544.039.149,- atau 93,03% terjadi efisien anggaran sebesar Rp 115.559.851,-. Karena target telah tercapai. Efisien anggaran diperoleh dari sisa pagu kontrak, perjalanan dinas, dan BBM.

2. Analisis Program dan kegiatan

Tabel 3.9

Hasil pengukuran cakupan kinerja meningkatnya
keberdayaan masyarakat melalui penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

No	Program	Realisasi tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Program Rehabilitasi Sosial	1.160 Orang	1.180	1.159	98,22
2	Program Penanganan Bencana	100%	1.049	1.049	100

Berdasarkan tabel 3.9 hasil pengukuran cakupan kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2021 mencapai 98,22% yaitu dari Program Rehabilitasi Sosial, dan capaian 100% dari program penanganan bencana, sangat baik.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.10

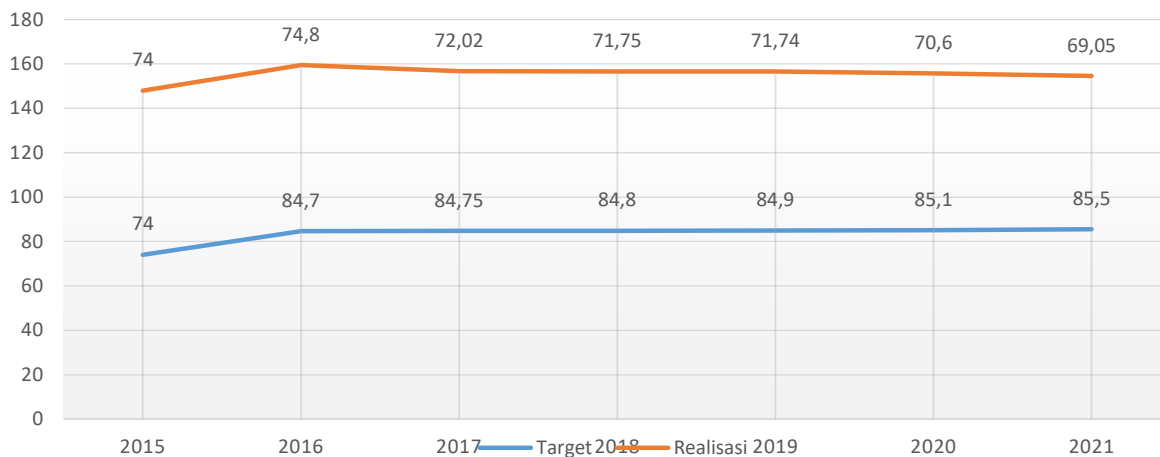
Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat
melalui cakupan peserta KB aktif tahun 2020 dibandingkan
dengan tahun 2021

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian
Persentase cakupan peserta KB aktif	%	85,10	70,60	85,50	69,05	80,84

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan peserta KB aktif tahun

2021 menunjukkan memperoleh capaian angka 80,76%, pada tahun 2020 dengan target 85,10% dengan realisasi 70,60% sedangkan target tahun 2021 sebesar 85,50% dengan realisasi 69,05%. Indikator kinerja ini tidak tercapai karena kesalahan pentargetan di awal tahun Rentra. Pentargetan melampaui target Nasional, dimana tahun 2021 ini hanya 65% jika dibanding dengan target nasional kita sudah melampaui target.

Grafik 3.3
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif



Dari grafik 3.13 Cakupan Peserta KB Aktif dapat dilihat realisasi pada tahun 2021 sebesar 69,05% dari target 85,50%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 70,60% dengan target 85,10%

4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Table 3.11
Realisasi anggaran cakupan peserta KB aktif
(Indikator kinerja utama (IKU) Dinsos PPKB kabupaten Kebumen yang mendukung IKU Daerah dalam RPJMD 2016-2021)

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengendalian Penduduk	379.134.000	372.669.875	98,29
<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam</i>	<i>73.980.000</i>	<i>71.976.795</i>	<i>97,29</i>

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<i>rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>			
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	49.133.795	98,27%
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	23.980.000	22.843.000	95,26%
<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	305.154.000	300.693.080	98,53%
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	280.934.000	278.195.200	99,02%
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	24.220.000	22.497.880	92,89%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.653.605.000	9.748.109.753	91,50%
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	2.097.014.000	1.849.246.661	88,18%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21.954.000	21.074.400	95,99%
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	158.740.000	144.799.500	91,22%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20.305.000	19.350.000	95,30%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.896.015.000	1.664.022.761	87,76%
<i>Pendayagunaan Tenaga</i>	4.849.208.000	4.455.447.000	91,87%

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<i>Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>			
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.223.668.000	829.908.000	67,82%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.625.540.000	3.625.539.000	99,05%
<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2.345.872.000</i>	<i>2.118.051.592</i>	<i>90,28%</i>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	134.842.000	120.131.200	89,09%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.191.030.000	1.979.464.217	90,34%
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	20.000.000	18.456.175	92,28%
<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB</i>	<i>1.361.511.000</i>	<i>1.325.364.500</i>	<i>97,34%</i>
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.361.511.000	1.325.364.500	97,34%
Total Anggaran	11.032.739.000	10.120.779.628	91,73%

Berdasarkan Tabel 3.14 cakupan peserta KB aktif tahun 2021 mendapat alokasi dana sebesar Rp 11.032.739.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 10.120.779.628,- atau 91,73% terjadi efisiensi anggaran sebesar 911.959.372,-. Karena target telah tercapai, efisiensi diperoleh dari sisa pagu kontrak, perjalanan dinas dan BBM.

5. Analisis Capaian Program dan Kegiatan

Capaian program pembangunan daerah yang berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Program
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Nama program / indikator kinerja	Target kinerja akhir periode RPJMD	Target kinerja tahun 2021	Realisasi kinerja tahun 2021	OPD penanggung jawab
1	Program keluarga berencana				
	a Peningkatan pelayanan KB di kecamatan	100	100	100	Dinsos PPKB
2	Program Pelayanan Kontrasepsi				
	b Cakupan pelayanan KB aktif	85,50	85,50	69,05	Dinsos PPKB

Dari tabel diatas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

Keseluruhan Program tersebut dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran urusan Meningkatnya keberdayaan masyarakat. Secara umum hampir semua indikator kinerja program yang melekat di Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten

Kebumen ditahun 2021 dapat terealisasi. Sedangkan yang tidak mencapai target adalah program keluarga berencana, adapun penyebab masalahnya adalah jumlah personil tenaga Penyuluh Keluarga Berencana yang tidak ideal, 1 Penyuluh KB mengampu 4 Desa. Dan belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan program tersebut terlihat dari capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan pembinaan Keluarga Sejahtera tahun 2020 dan 2021

Untuk mencapai Kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan target dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.13

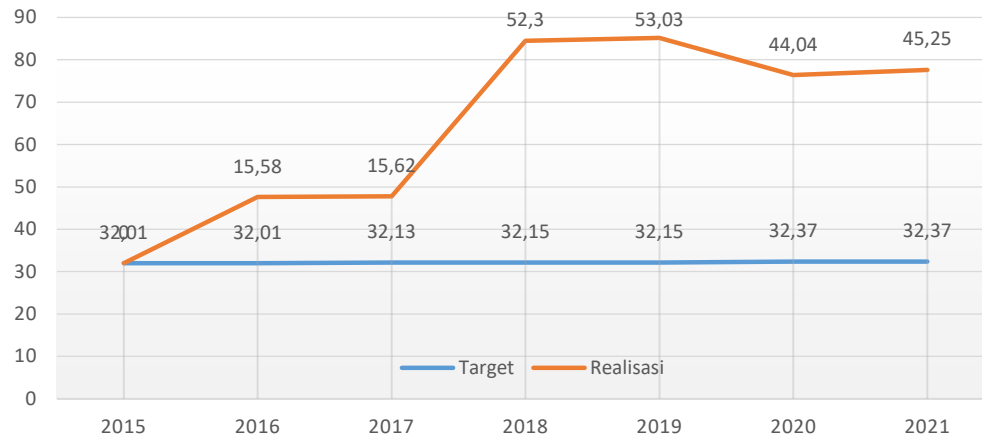
Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021

Indikator kinerja	satuan	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian 2021
Persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera	%	32,31	44,04	32,27	45,25	140,22

Capaian indikator kinerja meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui persentase cakupan pembinaan keluarga sejahtera tahun 2021 memperoleh capaian 140,22 %. Pada tahun 2020 dengan target 32,31% dapat mencapai realisasi sebesar 44,04 % sedangkan di tahun 2021 dengan target 32,27% terealisasi 45,25%. Realiasi capaian kinerja sebesar 140,22% di peroleh dari jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera

dan sejahtera I yang ber KB di bagi jumlah PUS anggota poktan keluarga prasejahtera dan sejahtera I di kali 100%.

Grafik 3.4
Cakupan Keluarga Sejahtera



Dari grafik 3.17 Keluarga Sejahtera dapat dilihat realisasi pada tahun 2021 sebesar 45,25% dengan target 32,37%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 44,04 dengan target 32,37%.

Tabel 3.14
Realisasi anggaran cakupan keluarga sejahtera
(Indicator kinerja utama (IKU) Dinsos PPKB Kabupaten Kebumen yang mendukung IKU Daerah dalam RPJMD 2016-2021)

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.177.596.000	1.065.465.307	90,47%
<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>1.177.596.000</i>	<i>1.065.465.307</i>	<i>90,47%</i>
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	285.000.000	225.800.000	79,22%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader	813.788.000	760.857.307	93,49%

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.808.000	78.808.000	100%
Total anggaran	1.177.596.000	1.065.465.307	90,47%

Berdasarkan tabel 3.14 cakupan keluarga sejahtera tahun 2021 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1.177.596.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.065.465.307,- atau sebesar 90,47% terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 112.130.693,-. Karena target sudah tercapai, efisiensi sebesar 9,53%.

8. Capaian kinerja urusan

Untuk mencapai Kinerja sasaran, Dinas Sosial PPKB menetapkan indikator kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan KB dengan target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Kebumen Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA URUSAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA 2021		TARGET AKHIR RPJMD
			T	R	
1. Cakupan peserta KB aktif	%	70,60	85,50	69,05	85,50
2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera	%	55,04	32,37	45,25	32,37

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat salah satunya melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Penyelenggaraan Program KB selain ditujukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Program/kegiatan yang selama ini dilaksanakan terutama dalam pelayanan KB adalah dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi, kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan dalam pemenuhan hak-hak reproduksi.

Capaian kinerja tahunan cakupan Peserta KB Aktif tahun 2021 sebesar angka 80,76%. Realisasi 2021 sebesar 69,05% diperoleh dari jumlah peserta KB aktif sebesar 133.698 jiwa dibagi jumlah PUS sebesar 193.660 jiwa dikali 100%. Realisasi tahun 2021 tidak mencapai target karena target yang ditetapkan terlalu tinggi yaitu sebesar 85,50%, sedangkan target Nasional sebesar 65%. Adapun perkembangan cakupan peserta KB aktif, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Capaian kinerja cakupan peserta KB Aktif tahun 2021

NO.	URAIAN KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,7	3	2,3	2,3	2,3
2.	Jumlah akseptor KB	155.134	154.502	141.693	141.808	137.676	133.723
	a. Laki-Laki	5.115	5.455	5.017	5.847	5.618	6.703
	b. Perempuan	150.019	149.047	136.676	135.961	132.058	127.020
3.	Jumlah Pasangan Usia Subur	208.841	206.543	199.509	198.315	199.214	193.660
4.	Jumlah Pasangan Usia Subur ber-KB	155.134	154.502	142.389	141.441	137.183	133.698

Sumber: DINSOS PPKB Kab. Kebumen, 2021

Dengan bertambahnya peserta KB aktif diharapkan dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kualitas SDM dapat meningkat dan dapat mengentaskan kemiskinan.

2. Cakupan Pembinaan Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

Capaian kinerja cakupan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar angka 139,78%. Atau dengan kata lain Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 45,25% sementara target yang ditetapkan 32,37%. Persentase ini dihitung dari jumlah PUS poktan Tribina yang ber KB Pra KS dan KS 1 sebesar 21.645 jiwa di bagi jumlah PUS Tribina dan UPPKS sebesar 47.836 jiwa di kali 100%. Target kinerja ini tercapai melalui program tenaga pendamping kelompok BKB (Bina Keluarga Balita, BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan program usaha kecil menengah kegiatan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif, yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

Table 3.17
Rekapitulasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen
Tahun 2021

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1.	Tahapan Keluarga Pra Sejahtera	25.143

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
2.	Tahapan Keluarga Sejahtera I	55.006
3.	Tahapan Keluarga Sejahtera II	113.261
4.	Tahapan Keluarga Sejahtera III	-
5.	Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus	-
	Total	193.410

Sumber: DINSOS PPKB Kab. Kebumen 2021

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target antara lain:

➤ **Permasalahan**

- 1) Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tidak sebanding dengan promosi 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampung 3-4 desa;
- 2) Belum semua PUS (pasangan usia subur) memahami program JKN sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB;
- 3) Sebagian besar masyarakat masih mengharapkan program KB dilaksanakan gratis;
- 4) Belum adanya produk hukum terkait dukungan anggaran kampung KB;
- 5) Belum maksimalnya advokasi kepada lintas sektor terkait, pemangku kepentingan terkait dengan pengalokasian anggaran guna mendukung kampung KB;
- 6) Kurangnya tenaga PLKB saat ini hanya ada 50 orang PLKB menangani 460 desa;
- 7) Terbatasnya SDM kader, banyak kader yang sudah tua dan gagap teknologi.
- 8) Terkendalanya pertemuan-pertemuan di wilayah karena adanya pandemi Covid-19.

Solusi yang ditempuh di tahun 2021 untuk penanganan hambatan yaitu:

➤ Solusi

- 1) Adanya basis data kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
- 2) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
- 3) Perlu adanya penyusunan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pelayanan KB dilaksanakan secara gratis;
- 4) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB di masing – masing lokasi kampung KB di 26 kecamatan. Pemetaan, analisa masalah, sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;
- 5) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 6) Mengusulkan penambahan PLKB ke BKKBN;
- 7) Melakukan peremajaan kader PPKBD sebanyak 460 dan sub PPKBD sebanyak 2.187;
- 8) Pembinaan terhadap kader institusi masyarakat pedesaan;
- 9) Peningkatan kualitas hidup manusia melalui kelompok UPPKS dengan jumlah sampai dengan tahun 2021 sebanyak 508 kelompok yang tersebar di 26 kecamatan;
- 10) Adanya penjadwalan dan pembagian pertemuan-pertemuan di wilayah, dan tetap menjaga protokol kesehatan.
- 11) Dilakukan verifikasi dan validasi antara DTKS, data PMKS dengan mengoptimalkan peran TKSK, PKH, dan kader PPKBD dan sub PPKBD.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 21.561.658.000,- (dua puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Jumlah ini naik dari alokasi anggaran belanja untuk tahun 2020 sebesar Rp 20.845.710.000,- atau dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 715.948.000,-.

Tabel 3.18
Perbandingan alokasi anggaran belanja Tahun anggaran 2020 dengan Tahun anggaran 2021

Uraian	TA.2020	TA.2021	Kenaikan/penurunan	%
Belanja				
Belanja tidak langsung	4.908.423.000	4.366.928.000	(541.495.000)	(88,96)
Belanja langsung	15.937.287.000	17.194.730.000	1.257.443.000	107,88

3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran. Secara umum dari anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp 21.561.658.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 19.563.311.308,- (90,73%). Dari target belanja Operasi sebesar Rp 19.573.454.000,- terealisasi Rp 17.993.109.308,- (91,93%), dan target Belanja Modal Rp 1.988.204.000,- terealisasi Rp 1.570.202.000,- (78,98%)

Tabel 3.19
Ikhtisar Realisasi Keuangan tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	19.573.454.000	17.993.109.308	91,93
	- Belanja Pegawai	4.366.928.000	3.855.773.386	88,29
	- Belanja barang dan jasa	13.994.278.000	13.022.522.722	93,06
	- Belanja hibah	294.075.000	234.859.600	79,86
	- Belanja bantuan sosial	918.173.000	879.953.600	95,84
2	Belanja Modal	1.988.204.000	1.570.202.000	78,98
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.574.571.000	1.186.840.000	75,38
	- Belanja modal gedung dan bangunan	413.633.000	383.362.000	92,68
	Jumlah	21.561.658.000	19.563.311.308	90,73

Berdasarkan realisasi tersebut diatas, Belanja Operasi dari pagu Rp 19.573.454.000,- terserap sebesar Rp 17.993.109.308,- atau 91,93%. Sedangkan untuk belanja modal dari pagu 1.988.204.000,- terserap sebesar 1.570.202.000,- atau sebesar 78,98%. Penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 19.563.311.308,- atau 90,73%, Baik.

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran pada belanja langsung untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2021.

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.337.788.000	4.766.800.585	89,30
2.	Program Pemberdayaan Sosial	317.569.000	250.887.253	79,00
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	10.000.000	2.399.100	23,99

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Kekerasan			
4.	Program Rehabilitasi Sosial	1.659.599.000	1.544.039.149	93,04
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	280.209.000	279.601.900	cakupa99,78
6.	Program Penanganan Bencana	1.275.540.000	1.079.781.581	86,06
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	470.618.000	435.371.805	92,51
8.	Program Pengendalian Penduduk	379.134.000	372.669.875	98,30
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	10.653.605.000	9.748.294.753	91,50
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.177.596.000	1.065.465.307	90,48
	JUMLAH	21.561.658.000	19.563.311.308	90,73

Adapun penyumbang rendahnya penyerapan anggaran adalah Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal yang persentase penyerapannya 23,99%, dikarenakan belanja di keluarkan hanya sesuai dengan kebutuhan. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan persentase penyerapan sebesar 79,00%, dikarenakan Honor TKSK dibayarkan dari Bulan Januari sampai bulan Juli. Dan Program Penanganan Bencana pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan persentase penyerapan sebesar 86,06% dikarenakan Penyediaan dapur umum di sesuaikan dengan kebutuhan, dan adanya efisiensi honor narsum

3.4 Capaian Kinerja Keuangan

Secara umum jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun anggaran 2020, maka pencapaian target penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan. Pada tahun anggaran 2020, realisasi penyerapan anggaran mencapai 92,96% dan pada tahun anggaran 2021 menjadi 90,73% mengalami penurunan sebesar 2,23%.

BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini dilaksanakan Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan bidang Keluarga Berencana pada masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial agar dilaksanakan secara optimal sebagaimana dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan berbagai uraian dan beberapa data yang telah disampaikan, maka Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan bahwa semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

- 1) Pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU Daerah), indikator angka kemiskinan belum mencapai target tetapi pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Kebumen mencapai 17,83% dari target 15,45%, (naik 0,24% dari tahun 2020 sebesar 17,59%)
- 2) Evaluasi kinerja keuangan dari 10 Program 21 kegiatan sebesar 94,26% masuk dalam kategori pencapaian 90-99,99%, sedangkan 5,74% masuk dalam kategori pencapaian kurang dari <90%
- 3) Total penyerapan anggaran APBD Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2021 sebesar Rp 19.563.311.308,- atau 90,73% dari total APBD sebesar Rp 21.561.658.000,-, apabila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2020 sebesar Rp 19.379.592.731 atau 92,96% mengalami penurunan sebesar 2,23%.

4.2 PERMASALAHAN / KENDALA

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tusi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial tentunya dijumpai berbagai macam permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tahun 2021, antara lain:

- 1) Belum tersedianya data PPKS yang komprehensif dan valid;
- 2) Banyaknya PPKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi.
- 3) Penanganan PPKS harus ditetapkan BNBA satu tahun sebelum tahun anggaran, sementara kasus baru sering muncul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera.
- 4) Banyaknya Lanjut Usia terlantar sementara di Kebumen belum ada lembaga yang secara khusus menangani.
- 5) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).
- 6) Tidak bisa mengeluarkan kepesertaan DTKS bagi warga yang sudah mampu khususnya PNS/TNI/POLRI.
- 7) Tidak ada perangkingan/ status kesejahteraan/ desil di dalam DTKS.
- 8) DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA.
- 9) Belum ada payung hukum terkait kriteria kemiskinan terupdate pengusulan DTKS.
- 10) Sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2021 permohonan DTKS dan BAST ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
- 11) Masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang resiko dan penanggulangan bencana.

- 12) Komposisi jumlah PLKB dan jumlah desa binaan yang tidak sebanding, rata-rata 1 PLKB mengampu 9 Desa yang seharusnya dengan perbandingan 1 PLKB mengampu 3-4 desa, 50 petugas PLKB mengampu 460 Desa;
- 13) Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) memahami program JKN sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan KB

4.3 STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa mendatang antara lain:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- 2) Guna optimalkan program gulkin dilaksanakan pemberian bantuan sesuai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- 3) Adanya data base kependudukan dan KB guna penyusunan kebijakan kependudukan dan KB;
- 4) Memberdayakan kader PPKBD dan sub PPKBD guna menggerakkan masyarakat ikut KB mensosialisasikan program JKN pada masyarakat khususnya calon peserta KB;
- 5) Penyusunan tahapan perencanaan, pelaksanaan pengembangan kampung KB dimasing-masing lokasi kampung KB di 26 Kecamatan. Pemetaan analisa masalah sinkronisasi data dan validasi data guna mendukung perumusan kebijakan kependudukan dan KB;
- 6) Mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan;
- 7) Mengusulkan penambahan PLKB ke BBKBN.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2021 Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kebumen semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penilaian kinerja yang akan datang.

Kebumen, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen

Drs. EKO WIDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630413 198607 1 001